

Identitas nasional: Antara idealisme kebangsaan dan realitas politik di Indonesia

Moch Nadzarudin Samsudin

Program Studi Manajemen, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: 250501110002@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

Identitas nasional; politik identitas; polarisasi; demokrasi; etika politik.

Keywords:

National identity; national identity; polarization; democracy; political ethics.

ABSTRAK

Identitas nasional pada dasarnya berfungsi sebagai perekat dalam menjaga persatuan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Namun, dalam praktik politik, identitas tersebut kerap mengalami pergeseran makna dan dimanfaatkan sebagai instrumen kepentingan kelompok. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis ketegangan antara idealisme identitas nasional dan realitas politik yang cenderung saling menjatuhkan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur terhadap berbagai jurnal dan buku yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa demokratisasi yang memberikan kebebasan luas justru mempertegas perbedaan identitas, terutama berbasis agama dan nasionalisme, yang berimplikasi pada meningkatnya polarisasi sosial, krisis kepercayaan terhadap pemerintah, serta penyebaran informasi yang tidak akurat. Selain itu, praktik komunikasi politik yang tidak etis, seperti personal branding berlebihan dan fenomena flexing politik, turut memperburuk kualitas demokrasi karena mengedepankan citra dibanding substansi kebijakan. Dengan demikian, diperlukan penguatan kembali pemahaman identitas nasional yang inklusif serta penerapan etika politik untuk menjaga stabilitas dan kualitas demokrasi di Indonesia.

ABSTRACT

National identity fundamentally serves as a cohesive force in sustaining unity within Indonesia's pluralistic society. However, in contemporary political practice, its meaning has increasingly been contested and instrumentalized to advance particular group interests. This article aims to examine the tension between the ideal conception of national identity and the political reality characterized by adversarial and delegitimizing practices in Indonesia. This study employs a qualitative method using a literature review approach, drawing upon relevant scholarly journals and academic books. The findings reveal that democratization, while expanding political freedoms, has simultaneously intensified identity-based divisions, particularly along religious and nationalist lines, thereby contributing to heightened social polarization, declining public trust in governmental institutions, and the proliferation of misinformation. Moreover, the prevalence of unethical political communication practices, including excessive personal branding and performative political behavior, further undermines the substantive quality of democratic processes by privileging image over policy discourse. Therefore, this study underscores the necessity of reconstructing an inclusive and substantive understanding of national identity, alongside reinforcing political ethics, in order to ensure the resilience and sustainability of democracy in Indonesia.



Pendahuluan

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki tingkat keberagaman yang sangat tinggi, baik dari segi suku, agama, budaya, maupun bahasa. Dalam kondisi yang demikian, identitas nasional menjadi elemen penting yang berfungsi sebagai perekat untuk menjaga persatuan dan keutuhan bangsa. Identitas nasional tidak hanya dipahami sebagai simbol atau konsep normatif, tetapi juga sebagai nilai yang mengandung kesadaran kolektif untuk hidup berdampingan di tengah perbedaan. Oleh karena itu, keberadaan identitas nasional menjadi sangat krusial dalam menopang kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam konteks masyarakat yang plural seperti Indonesia.

Seiring dengan perkembangan demokrasi di Indonesia, ruang kebebasan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik semakin terbuka. Kondisi ini pada satu sisi merupakan kemajuan karena mendorong keterlibatan publik secara lebih aktif. Namun, di sisi lain, keterbukaan tersebut juga memunculkan dinamika baru, salah satunya adalah menguatnya penggunaan identitas sebagai alat dalam kontestasi politik. Identitas yang seharusnya menjadi pemersatu justru sering kali dimanfaatkan untuk membangun loyalitas kelompok yang bersifat sempit dan emosional.

Fenomena tersebut tidak dapat dilepaskan dari praktik politik yang semakin pragmatis serta perkembangan media sosial yang mempercepat penyebaran informasi dan opini politik. Dalam situasi seperti ini, identitas menjadi instrumen yang efektif untuk memengaruhi persepsi publik, meskipun sering kali mengabaikan aspek rasionalitas dan substansi kebijakan. Akibatnya, muncul berbagai persoalan seperti polarisasi sosial, penyebaran hoaks, serta menurunnya kualitas etika dalam praktik politik.

Berdasarkan latar belakang tersebut, makalah ini bertujuan untuk mengkaji identitas nasional tidak hanya sebagai nilai ideal dalam kehidupan berbangsa, tetapi juga sebagai realitas yang mengalami pergeseran dalam praktik politik. Pembahasan difokuskan pada bagaimana identitas nasional dipahami sebagai nilai, bagaimana pergeserannya menjadi alat politik, serta dampak yang ditimbulkan terhadap kehidupan sosial dan kualitas demokrasi di Indonesia.

Pembahasan

Identitas Nasional Sebagai Nilai

Secara konseptual, identitas nasional dipahami sebagai fondasi utama dalam menjaga keutuhan suatu bangsa. Ia tidak hanya berbicara tentang kesamaan, tetapi juga tentang bagaimana perbedaan dapat dikelola dalam satu kesatuan yang utuh (Faslah, 2024). Dalam konteks Indonesia, identitas nasional lahir dari realitas keberagaman yang sangat kompleks, sehingga nilai kebhinekaan menjadi kunci penting yang menempatkan perbedaan sebagai kekuatan, bukan sebagai ancaman (Faslah, 2024). Dengan kata lain, identitas nasional tidak dibangun atas dasar keseragaman, melainkan dari kesadaran bersama untuk tetap hidup berdampingan di tengah perbedaan. Dalam pandangan yang lebih luas, kondisi ini sebenarnya menunjukkan bahwa Indonesia memiliki modal sosial yang sangat besar, karena tidak semua negara mampu menjadikan keberagaman

sebagai fondasi persatuan. Namun, modal tersebut tidak akan berarti banyak jika tidak terus dirawat dan dipahami secara kritis oleh masyarakatnya sendiri. Tanpa upaya untuk menjaga kesadaran ini, keberagaman yang seharusnya menjadi kekuatan justru berpotensi berubah menjadi sumber konflik.

Jika dilihat lebih jauh, identitas nasional bukan sekadar simbol yang ditampilkan dalam bentuk slogan, lambang negara, atau seremoni formal. Lebih dari itu, ia merupakan nilai yang hidup dalam cara masyarakat memandang dirinya sebagai bagian dari satu bangsa. Di sinilah letak pentingnya rasa memiliki dan kesadaran kolektif, karena tanpa keduanya, identitas nasional akan kehilangan makna praktisnya. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai-nilai seperti toleransi, solidaritas, dan saling menghargai menjadi bentuk konkret dari identitas tersebut, yang secara tidak langsung menjaga kohesi sosial di tengah masyarakat yang beragam (Faslah, 2024). Namun dalam realitasnya, tidak semua individu benar-benar menghayati nilai-nilai tersebut secara mendalam. Sering kali, identitas nasional hanya hadir pada momen-momen tertentu, seperti peringatan hari besar atau kegiatan seremonial, tetapi kurang tercermin dalam interaksi sosial sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada jarak antara pemahaman konseptual dengan praktik nyata di lapangan.

Dalam ranah politik, identitas nasional seharusnya tidak berhenti sebagai wacana, tetapi juga berfungsi sebagai pedoman etis dalam setiap praktik kekuasaan. Artinya, aktivitas politik idealnya berangkat dari nilai kebangsaan yang menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan kelompok. Politik yang berlandaskan identitas nasional semestinya mampu menciptakan ruang yang inklusif, terbuka, dan rasional, bukan justru memperuncing perbedaan yang ada. Namun dalam praktiknya, kondisi ini tidak selalu berjalan sesuai harapan, karena dunia politik sering kali berada dalam tarik-menarik antara idealisme dan kepentingan pragmatis yang lebih sempit. Tidak jarang, nilai kebangsaan hanya dijadikan legitimasi, sementara praktik yang dilakukan justru bertentangan dengan semangat persatuan itu sendiri. Jika dibiarkan, hal ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap politik, karena terdapat ketidaksesuaian antara nilai yang diklaim dengan realitas yang ditunjukkan.

Masalah mulai terlihat ketika nilai-nilai tersebut tidak benar-benar diinternalisasi secara mendalam dalam kehidupan masyarakat. Dalam banyak kasus, identitas nasional hanya dipahami sebagai konsep normatif yang diakui secara formal, tetapi belum sepenuhnya hadir dalam kesadaran kolektif (Zuhroh, 2014). Kondisi ini menyebabkan identitas nasional cenderung lemah ketika berhadapan dengan identitas lain yang lebih emosional dan dekat dengan kehidupan sehari-hari, seperti agama, suku, atau kelompok sosial tertentu (Zuhroh, 2014). Jika situasi ini terus berlangsung, maka identitas nasional berisiko hanya menjadi wacana yang kuat di atas kertas, tetapi lemah dalam praktik sosial maupun politik. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat membuka ruang bagi munculnya berbagai konflik berbasis identitas yang lebih sempit. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih serius untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan tidak hanya melalui pendidikan formal, tetapi juga melalui praktik sosial yang nyata agar identitas nasional benar-benar hidup dalam kehidupan masyarakat.

Pergeseran Identitas Sebagai Alat Politik

Perkembangan demokrasi di Indonesia membuka ruang kebebasan yang semakin luas bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses politik (Habibi, 2018). Keterbukaan ini pada dasarnya menjadi langkah maju karena mendorong partisipasi publik yang lebih aktif dan memberikan kesempatan bagi berbagai kelompok untuk menyuarakan kepentingannya. Namun, di balik hal tersebut, kebebasan ini juga membawa konsekuensi yang tidak sederhana, salah satunya adalah menguatnya politik identitas dalam berbagai kontestasi politik (Habibi, 2018). Dalam konteks ini, demokrasi tidak hanya berfungsi sebagai ruang partisipasi, tetapi juga berubah menjadi arena di mana identitas dipertarungkan secara terbuka. Jika dilihat lebih dalam, kondisi ini menunjukkan bahwa demokrasi tidak selalu berjalan linear menuju kematangan, tetapi juga menghadapi dinamika yang kompleks. Tanpa kesiapan masyarakat dalam mengelola perbedaan, kebebasan justru bisa membuka ruang bagi munculnya konflik yang lebih luas.

Identitas yang pada awalnya bersifat kultural dan menjadi bagian alami dari kehidupan sosial masyarakat, perlahan mengalami pergeseran fungsi. Dalam praktik politik, identitas mulai dimanfaatkan sebagai alat untuk menggalang dukungan massa (Habibi, 2018). Bahkan, dalam banyak kasus, isu agama dan nasionalisme digunakan untuk membangun loyalitas politik yang lebih bersifat emosional dibandingkan rasional (Habibi, 2018). Pendekatan seperti ini memang efektif dalam menarik simpati dalam waktu singkat, tetapi di sisi lain berisiko menyederhanakan persoalan politik yang sebenarnya kompleks. Jika terus digunakan, strategi ini dapat membentuk pola pikir masyarakat yang cenderung melihat politik secara hitam-putih, tanpa mempertimbangkan aspek yang lebih mendalam seperti program atau kebijakan.

Kecenderungan tersebut tidak terlepas dari praktik politik yang semakin pragmatis. Dalam dinamika politik kontemporer, strategi yang digunakan sering kali lebih menekankan pada efektivitas dalam meraih kekuasaan daripada konsistensi terhadap nilai atau ideologi. Hal ini dapat dilihat dari pola koalisi politik yang lebih didasarkan pada kepentingan praktis dibandingkan kesamaan visi atau prinsip (Munzir, 2019). Dalam situasi seperti ini, identitas menjadi alat yang paling mudah digunakan karena mampu menggerakkan massa secara cepat melalui kedekatan emosional. Jika dipahami lebih jauh, pragmatisme ini sebenarnya menunjukkan adanya pergeseran orientasi dalam politik, dari yang seharusnya berbasis nilai menjadi berbasis hasil semata. Akibatnya, batas antara strategi dan manipulasi menjadi semakin tipis.

Peran media sosial kemudian semakin memperkuat pergeseran tersebut. Media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga menjadi ruang pembentukan citra dan opini politik yang sangat efektif. Aktor politik memanfaatkannya untuk menyebarkan pesan, membangun persepsi, dan memperluas jangkauan pengaruh secara signifikan (Munzir, 2019). Dampaknya, isu-isu berbasis identitas dapat menyebar dengan sangat cepat, bahkan sering kali tanpa melalui proses verifikasi yang memadai. Dalam kondisi seperti ini, masyarakat berada pada posisi yang rentan terhadap informasi yang bias atau menyesatkan. Jika tidak diimbangi dengan kemampuan literasi digital yang baik, media sosial justru dapat menjadi alat yang memperkeruh situasi politik, bukan memperbaikinya.

Fenomena tersebut kemudian berimplikasi pada meningkatnya polarisasi sosial yang membelah masyarakat ke dalam kelompok-kelompok yang saling berhadapan serta memicu penyebaran hoaks di ruang publik (Habibi, 2018). Dalam situasi seperti ini, ruang publik tidak lagi menjadi tempat pertukaran gagasan yang sehat, melainkan dipenuhi oleh narasi yang memperkuat perbedaan. Masyarakat cenderung terjebak dalam logika “kita” dan “mereka”, yang pada akhirnya mempersempit ruang dialog. Jika dibiarkan, kondisi ini dapat merusak kohesi sosial yang telah dibangun dalam waktu yang lama. Bahkan, perbedaan yang seharusnya menjadi bagian dari dinamika demokrasi justru berubah menjadi sumber ketegangan yang sulit diredakan.

Dampak lebih lanjut dari kondisi ini adalah menurunnya kualitas rasionalitas dalam pengambilan keputusan politik. Ketika identitas dijadikan dasar utama dalam menentukan pilihan, maka pertimbangan terhadap program, gagasan, dan kapasitas pemimpin menjadi kurang diperhatikan. Dalam jangka panjang, hal ini berpotensi melemahkan kualitas demokrasi karena politik tidak lagi berorientasi pada kepentingan bersama, melainkan pada kepentingan kelompok tertentu. Jika kondisi ini terus berlangsung, masyarakat bisa kehilangan kemampuan untuk menilai secara objektif, sehingga keputusan politik yang diambil tidak selalu mencerminkan kebutuhan yang sebenarnya. Pada titik ini, demokrasi memang tetap berjalan secara prosedural, tetapi kehilangan kualitas substansialnya.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pergeseran identitas menjadi alat politik merupakan konsekuensi dari kombinasi antara keterbukaan demokrasi, pragmatisme politik, dan perkembangan media digital. Identitas yang seharusnya menjadi perekat sosial justru berpotensi berubah menjadi sumber perpecahan. Jika tidak dikelola dengan baik, kondisi ini dapat menggerus makna identitas nasional sebagai pemersatu bangsa. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran bersama untuk mengembalikan fungsi identitas pada tujuan awalnya, yaitu sebagai dasar untuk memperkuat persatuan, bukan sebagai alat untuk memperdalam perbedaan.

Dampak Ketegangan Identitas Sebagai Alat Politik

Menguatnya penggunaan identitas sebagai alat politik tidak hanya berhenti pada strategi perebutan kekuasaan, tetapi juga membawa dampak serius dalam kehidupan sosial masyarakat. Salah satu dampak yang paling terlihat adalah munculnya polarisasi sosial yang semakin tajam, di mana masyarakat mulai terbelah ke dalam kelompok-kelompok yang saling berhadapan (Habibi, 2018). Dalam berbagai kajian, kondisi ini muncul karena identitas yang terus dipolitisasi akan membentuk loyalitas kelompok yang bersifat emosional dan cenderung eksklusif (Annas et al., 2019). Jika diamati lebih jauh, situasi ini membuat ruang sosial terasa semakin sempit, karena masyarakat menjadi lebih berhati-hati bahkan cenderung menjauh dari kelompok yang berbeda pandangan.

Selain itu, ketegangan identitas juga berdampak pada cara informasi beredar di masyarakat. Dalam konteks politik modern, media sosial berperan besar dalam membentuk opini publik dan menyebarkan narasi politik secara cepat dan luas (Munzir, 2019). Namun, kemudahan ini tidak selalu diiringi dengan kemampuan literasi yang memadai, sehingga informasi yang beredar tidak semuanya dapat

dipertanggungjawabkan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa isu berbasis identitas sering dikemas dalam bentuk informasi yang bias bahkan hoaks untuk memperkuat kepentingan politik tertentu (Munzir, 2019). Akibatnya, masyarakat lebih mudah terpengaruh oleh informasi yang menggugah emosi daripada yang mendorong pemikiran rasional.

Di sisi lain, persoalan yang tidak kalah penting adalah menurunnya kualitas etika dalam praktik politik di Indonesia. Dalam sejumlah kajian, kondisi ini menunjukkan bahwa politik mulai bergeser dari ruang kompetisi gagasan menuju arena yang lebih menekankan pada pencitraan (Andale & Mesra, 2025). Idealnya, politik menjadi tempat beradu program dan solusi untuk kepentingan publik, tetapi dalam praktiknya justru sering didominasi oleh upaya membangun citra yang menarik di mata masyarakat (Andale & Mesra, 2025). Hal ini membuat substansi kebijakan menjadi kurang mendapat perhatian yang seharusnya.

Fenomena tersebut semakin diperkuat dengan maraknya praktik personal branding yang berlebihan di kalangan aktor politik. Upaya membangun citra diri memang menjadi bagian dari strategi komunikasi politik, tetapi ketika dilakukan secara dominan, hal ini justru menandakan adanya pergeseran orientasi dari kualitas menuju popularitas (Andale & Mesra, 2025). Dalam kondisi seperti ini, masyarakat sering kali lebih mengenal sosok daripada gagasan yang dibawanya.

Bahkan, dalam perkembangan yang lebih jauh, muncul fenomena flexing politik, yaitu upaya menampilkan simbol-simbol keberhasilan, kekuasaan, atau kemewahan untuk menarik simpati publik (Zaman, 2023). Praktik ini memperlihatkan bahwa politik tidak lagi berfokus pada substansi, tetapi lebih pada bagaimana citra tersebut dikonstruksi di hadapan publik. Alih-alih menjadi ruang diskusi yang sehat, politik justru berubah menjadi ajang pertunjukan yang menonjolkan tampilan luar.

Jika dicermati, kecenderungan ini membuat praktik politik semakin menjauh dari nilai-nilai idealnya. Alih-alih berkompetisi melalui gagasan dan program yang rasional, politik justru diwarnai oleh upaya saling menjatuhkan, pencitraan berlebihan, serta pertarungan citra yang dangkal (Zaman, 2023). Kondisi ini tidak hanya memperkeruh dinamika politik, tetapi juga membuat masyarakat kesulitan membedakan mana pemimpin yang benar-benar kompeten dan mana yang sekadar tampil meyakinkan.

Dalam jangka panjang, seluruh fenomena ini berimplikasi pada menurunnya kualitas demokrasi itu sendiri. Demokrasi yang seharusnya menjunjung tinggi rasionalitas justru mengalami pergeseran menjadi kompetisi berbasis sentimen identitas dan persepsi publik (Habibi, 2018). Masyarakat menjadi lebih mudah menentukan pilihan berdasarkan kedekatan emosional daripada pertimbangan objektif (Annas et al., 2019). Akibatnya, proses demokrasi tetap berjalan, tetapi tidak selalu menghasilkan keputusan yang berkualitas.

Jika ditarik lebih dalam, dampak-dampak tersebut sebenarnya saling berkaitan. Polarisasi sosial memperkuat penyebaran hoaks, hoaks memperkeruh kondisi masyarakat, sementara degradasi etika politik semakin memperlemah kualitas demokrasi (Munzir, 2019). Dalam situasi seperti ini, identitas nasional yang seharusnya menjadi pemersatu justru kehilangan perannya dan berubah menjadi alat yang

memperbesar perbedaan (Habibi, 2018). Dengan demikian, persoalan politik identitas tidak hanya berhenti pada strategi politik semata, tetapi telah memengaruhi cara masyarakat memahami dan menjalani kehidupan berbangsa secara keseluruhan.

Kesimpulan dan Saran

Identitas nasional pada dasarnya merupakan fondasi penting dalam menjaga persatuan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Namun, dalam perkembangan demokrasi, identitas tersebut mengalami pergeseran fungsi dari nilai pemersatu menjadi alat politik yang dimanfaatkan untuk kepentingan kekuasaan. Kondisi ini diperkuat oleh pragmatisme politik dan peran media sosial yang mempercepat penyebaran narasi berbasis identitas.

Akibatnya, muncul berbagai dampak seperti polarisasi sosial, penyebaran hoaks, serta menurunnya kualitas rasionalitas dan etika dalam praktik politik. Dalam jangka panjang, hal ini berpotensi melemahkan kualitas demokrasi dan menggeser orientasi politik dari kepentingan bersama menjadi kepentingan kelompok. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran kolektif untuk mengembalikan identitas nasional pada fungsinya sebagai pemersatu, agar demokrasi tidak hanya berjalan secara prosedural, tetapi juga memiliki kualitas yang substantif.

Daftar Pustaka

- Andale, A., & Mesra, R. (2025). *Pelibatan Politik Masyarakat dan Sikap Tentang Demokrasi terhadap Toleransi Politik di Desa Powalutan*. 3.
- Annas, F. B., Petranto, H. N., & Pramayoga, A. A. (2019). OPINI PUBLIK DALAM POLARISASI POLITIK DI MEDIA SOSIAL. *Jurnal PIKOM (Penelitian Komunikasi dan Pembangunan)*, 20(2), 111. <https://doi.org/10.31346/jpikom.v20i2.2006>
- Faslah, R. (with Faslah, R.). (2024). *Identitas Nasional, geostrategi, dan geopolitik: Membangun keberlanjutan dan kedaulatan*. PT. Literasi Nusantara Abadi Grup. <https://repository.uin-malang.ac.id/20872/>
- Habibi, M. (2018). *Analisis Politik Identitas di Indonesia*. INA-Rxiv. <https://doi.org/10.31227/osf.io/pey72>
- Munzir, A. A. (2019). Beragam Peran Media Sosial dalam Dunia Politik di Indonesia. *JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area*, 7(2), 173. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v7i2.2691>
- Zaman, S. (2023, August 2). *Flexing politik: Mengapa partai politik harus menjauhinya?* . <https://repository.uin-malang.ac.id/16749/>
- Zuhroh, N. (2014). Perilaku sosial budaya politik dan aktivitas religi masyarakat Indonesia. *J-PIPS (Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial)*, 1(1), 35–59. <https://repository.uin-malang.ac.id/8849/>